

RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS SOSIAL KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS SOSIAL

TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan ridho-Nya Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kabupaten Grobogan Tahun 2025 dapat disusun dengan baik. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kabupaten Grobogan Tahun 2025 merupakan rencana kerja yang akan dilakukan oleh Dinas Sosial selama 1 (satu) Tahun ke depan.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahunan Dinas Sosial merupakan keharusan dalam rangka menetapkan Program dan Kegiatan 1 (satu) tahunan sesuai dengan Visi Misi Kepala Daerah yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) SKPD dengan menyelaraskan Usulan/Aspirasi Masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2024.

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini adalah untuk mensinkronisasikan antara kebutuhan masyarakat dengan Program Kegiatan sesuai dengan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah & Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) Kabupaten Grobogan Tahun 2025 yang telah ditetapkan. Penyusunan Rencana Kerja ini juga bertujuan untuk mewujudkan Pembangunan Kesejahteraan Sosial masyarakat yang Terencana, Terarah, Terintegrasi dan Berkesinambungan dari setiap Program yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Grobogan pada setiap Tahun Anggaran.

Besar harapan kami, Rencana Kerja (RENJA) ini dapat digunakan sebagai Bahan Pertimbangan untuk memberikan umpan balik dan dasar dalam Pengambilan Kebijakan guna mengurangi Kesenjangan Pelayanan di Bidang Sosial.

Kami sadar bahwa dalam Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini masih banyak terdapat kekurangan sehingga kami sangat memerlukan saran, kritik maupun masukan dari semua pihak sebagai bahan untuk penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kabupaten Grobogan pada Tahun-tahun berikutnya.

Grobogan, 8 Maret 2024
KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN GROBOGAN

INDRI AGUS VELAWATI, SE.MM
NIP. 198508172009022012



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISI.....ii

DAFTAR TABEL.....iii

BAB 1 PENDAHULUAN.....1-1

 1.1 Latar Belakang

 1.2 Landasan Hukum

 1.3 Maksud dan Tujuan.....

 1.4 Sistematika Penulisan.....

BAB 2 HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT TAHUN LALU....2-1

 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian
 Renstra Perangkat Daerah 7

 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPD 12

 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 15

 2.4 Riveuw Terhadap Rancangan Awal RKPD..... 15

BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

 3.1 Telaaah Terhadap Kebijakan Nasional

 3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA PD

 3.3 Program dan Kegiatan.....

BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 22

BAB 5 PENUTUP 23



DAFTAR TABEL

- Tabel 2-1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun (Tahun berjalan)* Pemerintah Daerah**
- Tabel 2-2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan.**
- Tabel 2-3 Review Terhadap Awal RKPD Tahun 2024 Pemerintah Daerah Dinas Sosial Kabupaten Grobogan.**
- Tabel 2-4 Usulan Program dan Kegiatan Para Pemengku Kepentingan tahun 2024 Pemerintah Daerah Dinas Sosial Kabupaten Grobogan.**
- Tabel 3-1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2025 dan Perkiraan maju tahun 2026 Pemerintah Daerah Dinas Sosial Kabupaten Grobogan**



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah merupakan tahapan awal dalam perencanaan penganggaran. Hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Tata cara evaluasi peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka pembangunan Panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka Panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. Penyusunan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah , Hasil evaluasi renja tahun lalu dan hasil evaluasi renja tahun berjalan, bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, sub kegiatan , dan kelompok sasaran kegiatan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 antara lain:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja Tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam renja PD selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan).
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Untuk dapat mewujudkan Misi dalam melaksanakan Sasaran dan Kebijakan Strategis tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Grobogan menyusun Rencana Kerja Tahun 2025.



Selanjutnya Renja PD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran PD.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Grobogan Tahun 2025 adalah sebagai berikut

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang- Undang RI Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
3. Undang-Undang 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan



Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
12. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor : 1317 Tahun 2023 tentang perubahan atas Keputusan Menteri dalam negeri nomor : 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Validasi dan inventarisasi Pemutakiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 32 tahun 2021 tentang Pedoman keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota lainnya yang bersumber dari anggaran pendapatan dan Belanja dalam provinsi Jawa Tengah.
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 60 Tahun 2023 tentang Rencana Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim Provinsi Jawa Tengah tahun 2023-2024
15. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026;
17. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Grobogan

1.3 Maksud dan Tujuan

1 Maksud



Maksud dari Penyusunan Renja Dinas Sosial adalah mengawali proses perencanaan penganggaran sebagai dokumen perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program dilaksanakan oleh Dinas Sosial dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan dengan harapan dapat mendorong partisipasi masyarakat.

2. Tujuan

Sedangkan Tujuan Penyusunan Renja Dinas Sosial tahun 2025 adalah untuk memperjelas arah kebijakan dan sebagai acuan dalam menyusun kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Grobogan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Grobogan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Bagian Ketujuh , Pasal 129, terdiri dari lima bab.

Pada Bab Pertama, Yaitu Pendahuluan memuat latar belakang penyusunan Renja Dinas Sosial Kabupaten Grobogan yang menjelaskan tentang pengertian ringkas Ranjangan Renja Perangkat Daerah, Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah , dan Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah dan dokumen RKPD. Kemudian Landasan Hukum memuat penjelasan tentang undang-undang peraturan pemerintah, dan peraturan daerah yang mengatur tentang STOK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran . Pada bab pertama juga memuat maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah dan Sistematika Penulisan.

Bab kedua, yaitu Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, memuat evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan capaian renstra,



memuat analisis kinerja pelayanan perangkat daerah ,isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi serta reviu terhadap awal RKPD

Bab ketiga, Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, Bab ini terdiri atas Pertama; telaah terhadap kebijakan Nasional, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Kedua; Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah dirumuskan dasar isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat daerah yang berkaitan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah. Ketiga' Program dan Kegiatan sebagaimana yang telah termuat dalam Renstra Dinas.

Bab keempat, yaitu Rencana Kerja dan pendanaan perangkat daerah, berisi program kegiatan beserta target dan pendanaannya.

Bab kelima, yaitu Penutup berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.



BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Sosial

1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Kabupaten Tahun 2023

Renja Dinas Sosial tahun 2023 masih mengalami proses panjang untuk akhirnya ditetapkan menjadi DPA Perangkat Daerah dalam APBD 2023. Usulan anggaran dalam Renja tahun 2023 sebesar Rp. 17.850.000.000,- ditetapkan dalam APBD 2023 sebesar Rp. 5.718.026.952 termasuk belanja Pegawai sebesar Rp. 2.734.593.952, Belanja Barang dan Jasa Rp. 2.688.846.000,- Belanja Hibah Rp. 70.000.000 dan Belanja Modal Rp. 224.587.000,- Pembahasan masih terus dilakukan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah, sehingga masih dilakukan pergeseran anggaran dan perubahan anggaran, untuk Pergeseran anggaran tahap I Dinas sosial mendapat tambahan pagu sebesar :

Rp. 16.509.884.000,- termasuk belanja Pegawai Rp. 2.544.802.000,- Belanja Barang dan Jasa Rp. 3.504.682.000,- Belanja Hibah Rp. 260.400.000,- **Belanja Bantuan Sosial Rp. 10.200.000.000, dan Belanja Modal Rp. 245.587.000,-.**

DPA Dinas Sosial ditetapkan dengan Keputusan Sekertaris Daerah kabupaten Grobogan Nomor : 050/10/2023 tentang Persetujuan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2023.

Kemudian selama waktu berjalan sampai bulan Oktober 2023, DPA mengalami empat kali pergeseran anggaran. Kemudian pada Bulan Oktober melalui Perubahan Anggaran di tetapkan DPPA-SKPD Dinas Sosial Tahun 2023 Nomor : DPPA/B.2/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2023, Tanggal 02 Oktober 2023 melalui Keputusan Sekertaris Daerah Kabupaten Grobogan tentang Persetujuan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perumahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2023 Jumlah Anggaran perubahan sebesar Rp. 17.075.471.000 dengan Belanja Pegawai Rp. 2.546.302.000,00 Belanja Barang dan Jasa Rp. 3.511.962.000,-Belanja Hibah Rp. 260.400.000,- Belanja Bantuan Sosial Rp. 10.200.000.000 dan Belanja Modal sebesar Rp. 556.807.000,-

Sehubungan dengan target kinerja Dinas Sosial Kabupaten Grobogan sebagaimana tercantum dalam Renstra Dinas Sosial Kabupaten Grobogan maka pencapaian target kinerja berdasarkan indicator sebagaimana yang termuat dalam Rensrtar Dinsos tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :



1. Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan target pada tahun 2023 sebesar 1,4 %
2. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani dengan target pada tahun 2023 sebesar 40 %

Untuk melihat keberhasilan perencanaan tersebut perlu dilakukan evaluasi pelaksanaan rencana kerja dilakukan rencana kerja n-3 yaitu tahun 2022, rencana kerja n-2 yaitu tahun 2023 dan perkiraan capaian rencana kerja n-1 yaitu tahun 2024. Evaluasi tersebut diperlukan table 2.1

TABEL 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025
Kabupaten Grobogan

Dinas Sosial

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2022	Target dan Realiasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	06					Urusan Sosial		100	96,21	100	99,05	99,05	100		
1	06	01				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariat an yang sesuai SOP	100	95.01	100	97,71	97,71	100		
							Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	100	95.01	100	97,71	97,71	100		



							Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	<u>100</u>	95,01	100	97,71	97,71	100		
							Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	<u>100</u>	95,01	100	97,71	97,71	100		
1	06	01	2	01		Perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas	<u>100</u>	99,67	-	-	-	100	-	-
1	06	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan laopran Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKjIP tersusun	<u>1</u>	99,67	-	-	-	1	-	-
1	06	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	<u>100</u>	92,05	100	96,43	96,43	100		



Pemerintah Kabupaten Grobogan Dinas Sosial Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025

1	06	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN	<u>22</u>	20,22	22	96,31	96,31	22		
1	06	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	<u>5</u>	4,93	5	99,85	99,85	2		
1	06	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu	<u>100</u>	97,59	100	97,16	97,16	100		
1	06	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pakaian dinas dan atribut yang disediakan	<u>85</u>	80,95	85	97,16	97,16	85		
1	06	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	<u>5</u>	5	-	-	-	-	-	-
1	06	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi	<u>100</u>	99,87	100	99,83	99,83	100		



							Umum Perangkat Daerah								
1	06	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan cadangan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor	<u>10</u>	10	12	100	100	7		
1	06	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan cadangan Bahan Logistik Kantor	<u>12</u>	11,98	12	99,99	99,99	12		
1	06	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	<u>10</u>	10	12	12	100	12		
1	06	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang disediakan	<u>5</u>	4,98	4	4	100	4		
1	06	01	2	06	07	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Bahan/Materia l yang disediakan	<u>85</u>	84,41	56	56	98,65	56		
1	06	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Jumlah peyediaan	<u>12</u>	12	12	12	99,99	12		



						dan Konsultasi SKPD	fasilitasi kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
1	06	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	<u>100</u>	99,17	100	97,44	97,44	100		
1	06	01	2	07	<u>02</u>	Pengadaan Kendaraan dinas operasional kantor	Jumlah pengadaan mobil yang diadakan			1	1	97,30	1		
1	06	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	<u>8</u>	7,93	5	5	98,18	5		
1	06	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<u>100</u>	99,75	100	99,56	99,56	100		
1	06	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah waktu kebutuhan Surat	<u>12</u>	12	12	12	86,15	1300		



							Menyurat yang tersedia								
1	06	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<u>12</u>	11,93	4	4	99,81	12		
1	06	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah waktu pembayaran Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<u>12</u>	21,98	12	12	100	12		
1	06	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor	<u>25</u>	24,89	24	24	99,99	12		
1	06	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Layanan dukungan Administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	<u>100</u>	100	12	12	100	100		
1	06	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terbayarnya kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<u>100</u>	100	12	12	100	100		



1	06	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direabilitasi	<u>100</u>	3	3	3	100	100		
1	06	02				PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase peningkatan kapasitas PSKS Lembaga	<u>100</u>	97,07	100	98,83	98,83	100		
							Persentase peningkatan kapasitas PSKS Non Lembaga	<u>100</u>	97,07	100	98,83	98,83	100		9
1	06	02	2	02		<i>Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase pemohon ijin undian berhadiah yang ditangani</i>	<u>100</u>	100	-	-	-	-	-	-
1	06	02	2	02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah peserta koordinasi dan sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	<u>60</u>	60	-	-	-	-	-	-
1	06	02	2	03		<i>Pengembangan Potensi Sumber</i>	<i>Persentase peningkatan</i>	<u>100</u>	96,77	100	98,83	98,83	100		



						Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	kapasitas PSKS Lembaga dan Non Lembaga								
1	06	02	2	03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS Non Lembaga yang mendapatkan peningkatan kapasitas	2.200	1,890	400	400	99,88	2.200		
1	06	02	2	03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah TKSK Kecamatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas	19	15,88	19	19	98,37	19		
1	06	02	2	03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengurus Panti yang mendapatkan peningkatan kapasitas	52	51	1	1	98,37	-	-	-
							Jumlah Pengurus Karang taruna yang mendapatkan	300	299	1	1	99,80	-	-	-



							peningkatan kapasitas								
1	06	04				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS di Luar Panti yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	52	51,47	52	51,47	99,83	52		
1	06	04	2	01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti yang terlayani	100	98,80	100	4	100	100		
1	06	04	2	01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta gelandangan Pengengmis dan masyarakat	Jumlah peserta bimbingan fisik,mental, spiritual dan sosial	12	11,81	100	4	100	4		
1	06	04	2	02	03	Penyediaan Permakanan	Jumlah orang yang mendapatkan								



							<i>pemenuhan kebutuhan permakanaan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan kabupaten/kota</i>								
1	06	04	2	01	03	Penyediaan Alat Bantu	jumlah alat bantu yang disediakan bagi PPKS penyandang disabilitas terlantar di Rumah Singgah	<u>12</u>	11,81				5		
1	06	04	2	01	06	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar , Anak Terlantar , lanjut Usia Terlantar, serta Gelandagan Pengemis dan Masyarakat	jumlah Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar , Anak Terlantar , lanjut Usia Terlantar, serta Gelandagan Pengemis dan Masyarakat bagi penghuni Rumah Singgah						12		



1	06	04	2	02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PPKS Lainnya Bukan Korban HIV / AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	<u>4,66</u>	4,66	4,66	4,66	99,80			
1	06	04	2	02	<u>03</u>	Penyediaan Permakanan						100	200		
1	06	04	2	02	<u>05</u>	Penyediaan alat bantu						98,75	31		
1	06	04	2	02	<u>07</u>	Pemberian Bimbingan Fisik, mental, spiritual dan sosial						100			
1	06	04	2	02	14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan kerjasama kelembagaan yang diselenggarakan	<u>2</u>	2	2	2	100			
1	06	05				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang menerima Perlindungan dan Jaminan Sosial	<u>23,75</u>	23,34	23,75	23,34	99,53	42,77		
							Persentase Fakir miskin yang diberdayakan	<u>12,19</u>	12,15	12,19	12,15	99,53	16,55		



1	06	05	2	02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PPKS yang menerima Perlindungan dan Jaminan Sosial	<u>23,75</u>	23,34	23,75	23,34	99,53	611670		
							Persentase Fakir miskin yang diberdayakan		11,98	12,19	11,98	99,63	19		
1	06	05	2	02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Data Fakir Miskin yang tersedia	<u>611,669</u>	611.669			100			
1	06	05	2	02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Penerimaan Pendampingan Bantuan Sosial	<u>145,244</u>	128.700			92,42	611670		
1	06	05	2	02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah KPM PKH Penerima Pendampingan	<u>74,595</u>	74.595	74.570	74.595	99,84	60000		
1	06	06				PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase PPKS Korban Bencana yang Tertangani	<u>100</u>	98,06	100	98,76	98,76	100		98,76
1	06	06	2	01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase PPKS korban bencana alam dan sosial yang menerima bantuan sosial	<u>100</u>	97,57	100	98,76	98,76	100		



							<i>selama masa tanggap darurat</i>								
1	06	06	2	01	01	Penyediaan Makanan	Penyediaan kebutuhan makanan bagi PPKS korban bencana alam yang terpenuhi	<u>85</u>	82,83	85	98,76	98,76	150		
1	06	06	2	02		<i>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase SDM Taruna Siaga Bencana terlibat aktif dalam penanganan kebencanaan</i>	<u>100</u>	100	-	-	-	30		
1	06	06	2	02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah fasilitasi koordinasi pelaksanaan Taruna Siaga Bencana dalam penanganan PPKS korban bencana alam	<u>50</u>	50	-	-	-	30		
1	06	07				PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase sarana prasarana makam Pahlawan yang memenuhi standart	<u>78</u>	77,98	78	77.98	99,92	78		9



1	06	07	2	01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan standar sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan	<u>4</u>	77,98	78	77,98	99,92	78		
1	06	07	2	01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota	Jumlah Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana di areal Taman Makam Pahlawan	<u>4</u>	3,99	4	4	99,92	4		



Berdasarkan Tabel 2.1 tersebut bahwa ada 6 program di tahun 2022 sedangkan tahun 2023 ada 6 program dan tahun 2024 juga ada 6 Program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Grobogan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Program pertama Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada tahun 2022 dari target rencana kerja 100 % dapat tercapai 95,01 % dalam pelaksanaan program ini pada tahun 2023 dengan target 100 % dapat teralisasi 97,71 %.

Program kedua Program Pemberdayaan Sosial, Pada Program ini di tahun 2022 target capaian 100 % terealisasi 97,07 %. Sedangkan pada tahun 2023 dalam pelaksanaan program ini di target 100 % dan terealisasi 98,83 %.

Selanjutnya Program ketiga Program Rehabilitasi Sosial pada tahun 2022 dengan target 52 terealisasi 51,4 % . Pada tahun 2023 program ini ditarget 52 % dan dapat teralisasi 51,47% .

Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial pada tahun 2022 kegiatan tersebut diatas sesuai target Renstra 23,75 % dan realisasi 98,28 % Pada tahun 2023 ini diperkirakan terealisasi 23,34% dari target 99,53% .

Program Program Penanganan Bencana target tahun 2022 sebesar 100 % dapat tercapai 98,06 %. Untuk tahun 2023 Program tersebut dapat tercapai 98,76% dari target 100%.

Program keenam Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan yang indikatornya Persentase sarana prasarana makam Pahlawan yang memenuhi standart pada tahun 2022 merupakan program baru dengan target kinerja 78 % dan terlaksana 77,98 %. Untuk tahun 2023 Program tersebut dapat tercapai 80% dari target 80 %



2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Sosial Kabupaten Grobogan sesuai dengan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Grobogan tahun 2021-2026 dengan pengacu pada Rencana Pembangunan Daerah, makam mempunyai kewajiban untuk penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sebagaimana tertuang dalam indikator kinerja utama Dinas Sosial Kabupaten Grobogan , yaitu :

- 1. Persentase PPKS yang terangani
- 2. Persentase PPKS yang diberdadayakan
- 3. Meningkatkan kualitas pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Berikut ini sajian indikator berserta target dan realisasinya yang tertuang dalam tabel

Tabel 2.2 memperlihatkan pencapaian kinerja pelayanan di Dinas Sosial Kabupaten Grobogan. Adapun Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial baik Tujuan maupun Sasaran sesuai dengan tabel dibawah ini.



Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Sosial Kabupaten Grobogan

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase PPKS yang tertangani	V	v	38	40	45	50	36,45	89,64	45	50	
2	Persentase PSKS yang diberdayakan	-	-	100	100	100	100	97,07	99,05	100	100	
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan taman makam pahlawan	-	-	78	80	82	84	78	78	82	84	
4	Nilai SAKIP	-	-	B	B	B	B	B	B	B	B	
	Nilai IKM	-	-	B	B	B	B	B	B	B	B	



2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya bahwa tingkat capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Grobogan pada Tahun 2023 sudah tergolong baik, realisasi dari target Penanganan penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis diluar panti (Indikator SPM) yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Grobogan pada Tahun 2023 sebesar 91,87%. Sementara untuk Program Penanganan Bencana dengan Sasaran Indikator berupa Cakupan Penanganan Korban Bencana sebesar 100 %. Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Grobogan berdasarkan Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) termasuk dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) yang pertama yaitu Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani yang pada Tahun 2023 terealisasi sebesar 36,45%.

Ketercapaian atas berbagai target kinerja penyelenggaraan pelayanan urusan sosial di Kabupaten Grobogan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Grobogan tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kabupaten Grobogan dalam menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial, adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi tersebut diantaranya :

- a. Sudah diterapkannya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Permensos RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk penerapan SPM Bidang Sosial di Kabupaten Grobogan maka diharapkan secara anggaran tentunya dapat ditingkatkan dalam rangka penanganan permasalahan sosial di Kabupaten Grobogan.
- b. Untuk menunjang penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial, Pemerintah Kabupaten Grobogan khususnya Dinas Sosial Kabupaten Grobogan sudah memiliki Rumah Singgah atau Shelter yang di peruntukan untuk menampung disabilitas terlantar, Lansia terlantar, Anak terlantar, dan gelandangan pengemis selama paling lama maksimal 2 minggu, maksudnya manakala mereka ditemukan oleh keluarganya, kita kembalikan kepada keluarganya, namun jika belum ditemukan Keluarganya masih sangat bergantung pada daya



tampung dari Panti Sosial dan Rehabilitasi yang dimiliki oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan pihak swasta. Hal ini menyebabkan ketidakefektifan penanganan masalah sosial di Kabupaten Grobogan, karena daya tampung panti-panti tersebut pun sangat terbatas.

- c. Peningkatan jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Grobogan, khususnya permasalahan PPKS Jalanan (Gelandangan, Pengemis, Anak Jalanan, dan Wanita Tuna Susila), karena kaum urban tersebut sebagian besar tidak memiliki keterampilan dan kualifikasi yang cukup untuk masuk ke dunia kerja di Kabupaten Grobogan.
- d. Pelayanan dasar penyandang disabilitas di Dinas Sosial Kabupaten Grobogan banyak mengajukan permintaan/usulan alat bantu disabilitas namun belum bisa terpenuhi secara optimal karena terbatasnya anggaran sehingga penanganan permasalahan sosial tersebut perlu dilakukan kerjasama dengan pihak swasta dalam hal yayasan atau perusahaan melalui program CSR (Corporate Social Responsibilities).

Dengan adanya berbagai hambatan dan permasalahan di atas tentunya sangat berpengaruh pada tingkat capaian terhadap target Rencana Jangka Menengah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026, dimana apabila Dinas Sosial Kabupaten Grobogan hanya mengandalkan sumber dana APBD Kabupaten Grobogan tentu hasilnya sangat jauh dari harapan. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Grobogan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak terkait seperti Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Kementerian Sosial RI, Lembaga-lembaga Kesejahteraan Sosial yang ada di Kabupaten Grobogan, Organisasi Sosial, Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat, dan lain sebagainya.

Dinas Sosial Kabupaten Grobogan juga berkeyakinan bahwa penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial pada masa yang akan datang akan lebih baik, hal tersebut didukung oleh faktor-faktor berikut :

- a. Komitmen Kepala Daerah dalam hal ini Bupati Grobogan terhadap penanganan permasalahan sosial yang berkembang di masyarakat sangat tinggi, hal ini dibuktikan dengan masuknya penurunan angka kemiskinan



sebagai salah satu Misi dari Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 dan penurunan jumlah PPKS merupakan salah satu prioritas daerah.

- b. Komitmen dan perhatian dari Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Grobogan terhadap penanggulangan permasalahan sosial di Kabupaten Grobogan yang sangat tinggi, diharapkan mampu mendorong alokasi anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Grobogan.
- c. Dukungan dari para stakeholders (dunia usaha, Lembaga Kesejahteraan Sosial, Organisasi Sosial, dll) terkait penanggulangan permasalahan sosial di masyarakat yang terkoordinir dengan baik.
- d. Trend alokasi anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dari APBD Kabupaten Grobogan yang meningkat setiap tahunnya.

Permasalahan sosial yang terjadi di Kabupaten Grobogan khususnya Penanggulangan PPKS ini perlu ditindaklanjuti secara komprehensif, dimana Dinas Sosial Kabupaten Grobogan perlu memformulasikan program dan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial yang dapat mengakomodir semua kalangan.

Isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Grobogan adalah belum tertanganinya fakir miskin secara keseluruhan, sesuai dengan visi misi Bupati Grobogan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Perangkat Daerah

Berdasarkan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (PD Kabupaten Grobogan Tahun 2024 bahwa Dinas Sosial Kabupaten Grobogan bertanggungjawab atas penyelenggaraan salah satu prioritas daerah terkait penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Grobogan. Dalam Rancangan Awal Perangkat Daerah Tahun 2024 semua Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang pada Dinas Sosial Kabupaten Grobogan sudah sesuai dengan kebutuhan Dinas Sosial Kabupaten Grobogan.

Review terhadap rancangan awal Perangkat Daerah akan dilaksanakan pada saat pembuatan rencana kerja perangkat daerah. Di samping review terhadap rancangan awal Perangkat Daerah dilakukan juga analisa



terhadap usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan. Analisa ini dilakukan setelah pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan dilaksanakan. Review Rancangan Awal Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel 2.3 dibawah ini



RENJA 2024

DINAS SOSIAL KAB. GROBOGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
							Target 2024	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1	6				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			26,372,514,252				
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	100%	20,003,278,952	Dinas Sosial			
1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			160,000,000				
1	06	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Penyusunan perencanaan Perangkat Daerah	10 dok	65,000,000	Dinas Sosial	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Dinas Sosial	
Pekerjaan					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terfasilitasinya dokumen perncanaan perangkat daerah	10 dok	1	Dinas Sosial	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		
1	06	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksnannya koordinasi penyusunan Dokumen RKA- SKPD	12 bulan	20,000,000	Dinas Sosial	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Dinas Sosial	
Pekerjaan					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terfasilitasinya koordinasi penyusunan Dokumen RKA- SKPD	12 bulan	20,000,000	Dinas Sosial	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		
1	06	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terpenuhinya dokumen RKPD	12 bulan	75,000,000	Dinas Sosial	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Dinas Sosial	



Pekerjaan					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terfasilitasinya kegiatan koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 bulan	75,000,000	Dinas Sosial	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		
1	06	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Dinas Sosial
1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2,800,933,952		2,800,933,952		
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran yang menerima gaji ASN Dinas Sosial Kabupaten Grobogan	24 orang	2,714,853,952	Dinas Sosial	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Sosial
Pekerjaan					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji, Tunjangan ,Jaminan Kesehatan	24 orang	2,714,853,952	Dinas Sosial	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Sosial
1	06	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			-		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Dinas Sosial
1	06	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah untuk pembayaran honorarium operator komputer dan tersusunnya Laporan Keuangan	5 Orang	55,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Dinas Sosial
Pekerjaan					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah untuk pembayaran honorarium operator komputer dan tersusunnya Laporan Keuangan	5 Orang	55,000,000				



1	06	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			-		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Dinas Sosial
1	06	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La Koordinasi Penyusunan L Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Sem SKPD	3 Laporan	86,080,000	Dinas Sosial	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Sosial
Pekerjaan					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/se mesteran SKPD tersusun	3 laporan	86,080,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Sosial
1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Penyelesaian dokumen administrasi kepegawaian tepat waktu		340,000,000				
1	06	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas untuk karyawan- karyawan Dinas Sosial	4 item	165,000,000	Dinas Sosial	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Dinas Sosial
Pekerjaan					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan atribut yang disediakan	4 item	165,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Sosial
1	06	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokume 1 dokumen	15,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Sosial
Pekerjaan					Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah dokumen	1 Dokume 1 dokumen	15,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Dinas Sosial



						monitoring, evaluasi dan penilaian Kinerja Pegawai						
1	06	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	55 Orang	75,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Dinas Sosial
Pekerjaan					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		55 Orang	75,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		
1	06	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	55 Orang	85,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Dinas Sosial
Pekerjaan					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	55 Orang	85,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Dinas Sosial
1	06	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Dinas Sosial
1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan administrasi umum	100%	1,311,685,000				
1	06	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	65 item	75,000,000	Dinas Sosial	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Sosial
Pekerjaan					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan cadangan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	65 item	75,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Sosial



1	06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	15 item	45,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Sosial
Pekerjaan					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terfasilitasinya Peralatan dan perlengkapan kantor	15 item	45,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Sosial
1	06	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 bulan	210,685,000	Dinas Sosial	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Sosial
Pekerjaan					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan makan dan minum untuk rapat dan ekstrafooding	12 bulan	210,685,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Sosial
1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan pengadaan	12	39,000,000	Dinas Sosial	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Sosial
Pekerjaan					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan pengadaan	12 bulan	39,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Sosial
1	06	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		15,000,000	Dinas Sosial	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Sosial
Pekerjaan					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	150,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Sosial
1	06	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan /material yang disediakan	12 bulan	145,000,000	Dinas Sosial	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Sosial
Pekerjaan					Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan /material yang disediakan	12 bulan	145,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Sosial



1	06	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Bulan	12,000,000	Dinas Sosial	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Sosial
Pekerjaan					Fasilitasi kunjungan Tamu	Terfasilitasinya jamuan untuk kunjungan tamu	12 bulan	12,000,000	Dinas Sosial	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Sosial
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyediaan fasilitas kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 bulan	750,000,000	Dinas Sosial	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Sosial
Pekerjaan					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyediaan fasilitas kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 bulan	750,000,000	Dinas Sosial	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Sosial
1	06	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip dinamis yang tertata		10,000,000	Dinas Sosial	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Sosial
Pekerjaan					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya kegiatan arsip dinamis		10,000,000	Dinas Sosial			
1	06	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		10,000,000	Dinas Sosial	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Sosial
Pekerjaan					Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		10,000,000	Dinas Sosial			
1	06	01	2.07			Presentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah tepat waktu		14,481,000,000				
1	06	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah penyediaan Kendaraan operasional	1 unit	286,000,000	Dinas Sosial	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Sosial



Pemerintah Kabupaten Grobogan Dinas Sosial Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025

Pekerjaan					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah penyediaan Kendaraan operasional	1 unit	286,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Sosial
1	06	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	15 item	195,000,000	Dinas Sosial	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Sosial
Pekerjaan					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	15 item	195,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Sosial
1	06	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Terbangunnya Gedung kantor Dinas Sosial	0 Unit 2 lantai	14,000,000,000	Dinas Sosial	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Sosial
	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	562,000,000				
1	06	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah waktu kebutuhan surat menyurat yang tersedia	12 bulan	13,000,000	Dinas Sosial	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Sosial
Pekerjaan					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah waktu kebutuhan surat menyurat yang tersedia	12 bulan	13,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Sosial
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	ada 4 item untuk pembayaran listrik, ledeng, telpon dan speedy kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 item 12 Bulan	150,000,000	Dinas Sosial	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Sosial



Pekerjaan					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	ada 4 item untuk pembayaran listrik, ledeng, telpon dan speedy kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan	150,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Sosial
1	06	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah waktu pembayaran jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	49,000,000	Dinas Sosial	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Sosial
Pekerjaan					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah waktu pembayaran jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	49,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Sosial
1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran jasa pelayanan umum kantor	25 orang	350,000,000	Dinas Sosial	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Sosial
Pekerjaan					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran jasa pelayanan umum kantor	25 orang	350,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Sosial
1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara	100%	347,660,000				
1	06	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah waktu pemeliharaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan terpelihara	13 unit	177,660,000	Dinas Sosial	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Sosial
Pekerjaan					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah waktu pemeliharaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan terpelihara	13 unit	177,660,000	Dinas Sosial	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Sosial



1	06	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	jumlah pemeliharaan mebeleair yang dipelihara	45 unit	55,000,000	Dinas Sosial	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Sosial
Pekerjaan					Pemeliharaan Mebel	Terfasilitasinya jumlah pemeliharaan mebelair	45 unit	55,000,000	Dinas Sosial	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Dinas Sosial
1	06	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	35	50,000,000	Dinas Sosial	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Sosial
Pekerjaan					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terfasilitasinya jumlah peralatan dan mesin lainnya	35	50,000,000	Dinas Sosial	Dana Tranfer Umum		Dinas Sosial
	06	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah waktu pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	2 gedung	65,000,000	Dinas Sosial	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Sosial
Pekerjaan					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah waktu pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	2 gedung	65,000,000	Dinas Sosial	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Sosial
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Presentase peningkatan kapasitas PSKS Lembaga dan Presentase peningkatan kapasitas PSKS non lembaga	100%	438,560,300				
1	06	02	2.02		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota			45,000,000				
1	06	02	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang		45,000,000	Kab Grobogan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Dinas Sosial



Pekerjaan					Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Terlaksanannya koordinasi dan sinkronisasi penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau barang		45,000,000	Kab Grobogan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Presentase peningkatan kapasitas PSKS Lembaga dan Presentase peningkatan kapasitas PSKS non lembaga	100%	393,560,300	Kab Grobogan			
1	06	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS Non Lembaga yang mendapatkan peningkatan kapasitas	2300 kk	65,685,500	Kab Grobogan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Sosial
Pekerjaan					Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Budaya	Jumlah PSKS Non Lembaga yang mendapatkan peningkatan kapasitas	2300 kk	65,685,500	Kab Grobogan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Sosial
1	06	02	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kabupaten/kota yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kabupaten/Kota		30,840,000	Kab Grobogan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Dinas Sosial
Pekerjaan					Pemberdayaan dan Pembinaan TKSK	Jumlah TKSK yang mendapatkan peningkatan kapasitas	19 kecamatan	30,840,000	Kab Grobogan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Dinas Sosial
1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		277,874,800	Kab Grobogan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Dinas Sosial



Pekerjaan					Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengurus panti yang mendapatkan peningkatan kapasitas	1 Lembaga	68,389,800	Kab Grobogan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Dinas Sosial
Pekerjaan					Pembinaan dan Pelatihan Karang Taruna	Jumlah Lembaga yang mendapatkan peningkatan kapasitas	50	209,485,000	Kab Grobogan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Dinas Sosial
1	06	02	2.03	05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari hasil peningkatan SDM dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten /Kota		50,000,000	Kab Grobogan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Dinas Sosial
Pekerjaan					Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat Peningkatan SDM dan LK3	25 Orang	50,000,000	Kab Grobogan	Dana Transfer Umum	Dinas Sosial
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Prosentase PPKS diluar Panti yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	52	2,535,000,000			
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, Lanjut Usia, terlantar serta gelandangan pengemis di Luar Panti yang terlayani	100%	1,680,000,000			
	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gisi minimal	770	450,000,000	PGOT	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Dinas Sosial



						kewenangan Kabupaten/Kota						
Pekerjaan					Penyediaan Permakanan untuk Rumah Singgah	Terpenuhinya kebutuhan permakanan per orang sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan Kabupaten/Kota	200 orang	150,000,000	PGOT	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Dinas Sosial
Pekerjaan					Pemberian Sembako Bagi Penyandang Disabilitas	Terlaksananya kegiatan Pemenuhan kebutuhan Sembako dan nutrisi bagi penyandang disabilitas	570	300,000,000	Kab Grobogan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Dinas Sosial
1	06	04	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang menerima pakian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan kabupaten /kota	200	100,000,000	PGOT	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Dinas Sosial
Pekerjaan					Penyediaan Sandang	Tersedianya pakaian dan kelengkapan lainnya dalam 1 tahun kewenangan Kabupaten /Kota	200	100,000,000	PGOT	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Dinas Sosial
1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan Kabupaten/Kota	150	360,000,000				



Pekerjaan					Penyediaan Alat Bantu	Terpenuhinya orang yang mendapatkan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan kabupaten/kota	150	360,000,000	Disabilitas	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Dinas Sosial
1	06	04	2.01	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan Kabupaten /Kota	50	75,000,000	PGOT	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Dinas Sosial
Pekerjaan					Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Terpenuhinya orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	50	75,000,000	PGOT	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Dinas Sosial
	06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	220	325,000,000	Dinas Sosial	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Dinas Sosial
Pekerjaan					Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	40	120,000,000	Dinas Sosial	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Dinas Sosial
Pekerjaan					Pemberian Layanan Kedaruratan/Study Referensi Rumah Singgah	Terlaksananya Pemberian Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	100	50,000,000	Dinas Sosial	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Dinas Sosial



Pekerjaan					Pembinaan Kube Disabilitas	Terlaksananya Pembinaan KUBE Penyandang Disabilitas 40 orang	55,000,000	Kube	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Dinas Sosial	
Pekerjaan					Pelatihan dan Ketrampilan bagi Penyandang Disabilitas	Terlaksananya pekerjaan Pelatihan Ketrampilan bagi Penyadang Disabilitas 40 orang	100,000,000	Disabilitas	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Dinas Sosial	
1	06	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Jumlh peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, anak terlantar, Lanjut Usia terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kabupaten/ Kota	400	320,000,000	Kab Grobogan	Dana Tranfer Umum	Dinas Sosial
Pekerjaan					Pembinaan Lanjut Usia terlantar	Lanjut Usia terlantar , termasuk lanjut usia yang rentan dengan permasalahan sosial	100	135,000,000	Kab Grobogan	Dana Transfer Umum	Dinas Sosial
Pekerjaan					Pelatihan Ketrampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar	Anak-anak terlantar ,termasuk ,anak putus sekolah, anak nakal, anak dari keluarga misikin dan anak yang rentan dengan permasalahan sosial	75	75,000,000	Kab Grobogan	Dana Transfer Umum	Dinas Sosial
Pekerjaan					Penanganan dan Pendampingan anak jalanan,anak Punk, anak terlantar,anak nakal, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH)	anak jalanan pengemis, anak punk, anak terlantar,anak nakal, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH)	75	125,000,000	Kab Grobogan	Dana Transfer Umum	Dinas Sosial



Pekerjaan					Sosialisasi Pengangkatan Anak (Adopsi) di desa/ Kelurahan	Masyarakat Desa/Kelurahan	150	110,000,000	Kab Grobogan	Dana Transfer Umum		Dinas Sosial
1	06	04	2.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedarutan Kabupaten/Kota	100	50,000,000	Dinas Sosial	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Dinas Sosial
Pekerjaan					Pemberian Layanan Kedarutan PGOT	Terlaksananya pekerjaan Penyediaan Pelayanan Kedarutan bagi PGOT	100	50,000,000	Dinas Sosial	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Dinas Sosial
1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PPKS Lainnya Bukan Korban HIV / AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	100%	855,000,000	Kab Grobogan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Sosial
1	06	04	2.02	01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah orang yang mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/ Kota						
Pekerjaan					Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah orang yang mendapatkan layanan Data dan pengaduan kewenangan Kabupaten /Kota			Shelter/Rumah Singgah	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Sosial
1	06	04	2.02	02	Pemberian Layanan Kedarutan	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedarutan Kabupaten/Kota				Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Sosial



Pekerjaan					Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan Kabupaten/Kota				Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Sosial
1	06	04	2.02	03	Penyediaan Permakanan	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gisi minimal kewenangan Kabupaten/Kota				Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Sosial
Pekerjaan					Penyediaan Permakanan	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gisi minimal kewenangan Kabupaten/Kota				Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Sosial
1	06	04	2.02	04	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan sandang sesuai dengan standar gisi minimal kewenangan Kabupaten/Kota		-		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Dinas Sosial
1	06	04	2.02	05	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah unit disabilitas mendapatkan pemenuhan kebutuhan bantu sesuai dengan standar gisi minimal kewenangan Kabupaten/Kota						
1	06	04	2.02	07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Kegiatan fisik mendapatkan pemenuhan kebutuhan sosial sesuai dengan standar gisi minimal kewenangan Kabupaten/Kota	360	460,000,000	Kab.Grobogan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Dinas Sosial



Pekerjaan					Penjaringan Pengemis, Gelandangan dan orang terlarang	Terlaksananya Kegiatan Penjaringan Terhadap PGOT	190	100,000,000	Kab.Grobogan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Dinas Sosial
Pekerjaan					Pelatihan Ketrampilan Wanita Tuna Susila (WTS)	Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Terhadap WTS	60	110,000,000	Kab.Grobogan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Dinas Sosial
Pekerjaan					Pelatihan Ketrampilan Bagi Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Ketrampilan terhadap ODHA	60	125,000,000	Kab.Grobogan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Dinas Sosial
Pekerjaan					Pelatihan dan Ketrampilan Eks Tuna Sosial	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Keluarga Eks Tuna Sosial	50	125,000,000	Kab.Grobogan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Dinas Sosial
1	06	04	2.02	12	Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitas Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan	100	395,000,000				
Pekerjaan					Rapat Koordinasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Kabupaten Grobogan (Study Referensi Luar Daerah)	Pengurus LKS dan LKKS	50	120,000,000	Kab Grobogan	Dana Transfer umum		Dinas Sosial
Pekerjaan					Pembinaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Study Referensi LKSA Luar Daerah	Pengurus dan anak Lembaga	50	275,000,000	Kab Grobogan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Dinas Sosial
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Presentase PPKS yang menerima Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Presentase Fakir miskin yang diberdayakan	23.75%	1,265,675,000	Kab Grobogan			
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase PPKS yang menerima Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Presentase Fakir miskin yang diberdayakan	23.75%	556,559,800	Kab Grobogan			



Pemerintah Kabupaten Grobogan Dinas Sosial Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025

1	06	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Data Fakir miskin yang tersedia	611,669	70,000,000	Kab Grobogan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Pengembangan Potensi dan Daya Saing Ekonomi	Dinas Sosial
Pekerjaan					Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Data Fakir miskin yang tersedia	611,669	70,000,000	Kab Grobogan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Pengembangan Potensi dan Daya Saing Ekonomi	Dinas Sosial
1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fakir miskin penerimaan pendampingan bantuan sosial	145,244	395,675,000	Kab Grobogan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Sosial
Pekerjaan					Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fakir miskin penerimaan pendampingan bantuan sosial	145,244	395,675,000	Kab Grobogan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Sosial
1	06	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	221 orang	800,000,000	SDM PKH di Kabupaten Grobogan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Sosial
Pekerjaan					Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Sosial
1	06	05	2.02	4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Terpenuhinya orang yang mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kab/Kota	300 orang	175,000,000	TKSK, Puskesmas dan Kecamatan di Kab. Grobogan			



Pekerjaan					Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Terpenuhinya orang yang mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kab/Kota						
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA			480,000,000				
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase PPKS korban Bencana alam dan sosial menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%	200,000,000				
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	Penyediaan Kebutuhan makanan bagi PPKS korban bencana alam yang terpenuhi	300 orang	200,000,000	Korban Bencana alam/sosial diKab. Grobogan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Sosial
Pekerjaan					Penyediaan Makanan	Penyediaan Kebutuhan makanan bagi PPKS korban bencana alam yang terpenuhi	300 orang	200,000,000	Korban Bencana alam/sosial diKab. Grobogan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Sosial
1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten /Kota			280,000,000				
1	06	06	2.02	01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah kampung yang melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	200 orang	130,000,000	Masyarakat di daerah rawan bencana	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Sosial
Pekerjaan					Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah kampung yang melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	200 orang	130,000,000	Masyarakat di daerah rawan bencana	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Sosial



						Kewenangan Kabupaten/Kota						
1	06	06	2.02	01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah orang yang melaksanakan koordinasi sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana kewenangan kabupaten /kota	50 orang	150,000,000	Relawan dan taruna siaga bencana	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Sosial
Pekerjaan					Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah orang yang melaksanakan koordinasi sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana kewenangan kabupaten /kota						
1	06	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN							
1	06	03	2;01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak kekerasan dan titik debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa /Kelurahan Asal							
1	06	03	2;01	01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa Kelurahan asal	Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan yang dipulangkan dari titik debarkasi di daerah provinsi untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal kewenangan kabupaten/kota						



Pekerjaan					Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa Kelurahan asal	Terfasilitasinya pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah provinsi untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal kewenangan Kabupaten /Kota						
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Sarana prasarana makam pahlawan yang memenuhi standart	78%	1,650,000,000	Kab Grobogan			
1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Presentase pemenuhan standar sarana dan prasarana Taman Makam	4 Lokasi TMP	1,650,000,000	Kab Grobogan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Dinas Sosial
1	06	07	2.01	01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	4 Lokasi TMP	1,000,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Dinas Sosial
Pekerjaan												
1	06	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota Jumlah pembayaran honor petugas kebersihan di TMP dan MP Kab. Grobogan	4 Lokasi TMP	650,000,000	Kab Grobogan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Dinas Sosial



Pekerjaan	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana di areal Taman Makam Pahlawan	4 Lokasi TMP	650,000,000	Kab Grobogan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Dinas Sosial
				26,372,514,252				



2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/Kegiatan Tahun 2025 yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan maupun stake holder lainnya pada Musrenbang Tahun 2024 yang dilaksanakan.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Persentase PPKS di Luar Panti yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	2 paket	
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti yang terlayani	2 paket	
1.06.04.2.01.0006	Pemberian bimbingan social kepada keluarga penyandang Disabilitas, Lanjut Usia terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan masyarakat		Jumlah alat bantu yang disediakan bagi PPKS penyandang disabilitas terlantar di Rumah Singgah	2 paket	
Pekerjaan	Bintek Industri Keratif (Difabel)	Kec. Grobogan	Usulan dari musrenbang Kecamatan Grobogan	Rp 300.000.000 (30 orang)	
	Bantuan Kursi Roda	Kec. Tanggungharjo	Usulan dari musrenbang Kecamatan Tanggungharjo	Rp 50.000.000 (5 unit)	



BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Yang dimaksud dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial ialah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial.

Kebijakan nasional terhadap urusan Sosial meliputi :

1) **Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi penduduk miskin dan rentan.**

Kemiskinan Ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial.

Kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat dalam Penanggulangan Kemiskinan adalah untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

2) **Meningkatnya kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial**

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2018 mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM), Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan dasar kepada publik. Pelayanan Dasar (PD) sendiri merupakan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. **Standar Pelayanan Minimal (SPM)** merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima.

Bentuk PD untuk SPM terdiri atas berbagai jenis, salah satunya melalui sosial atau disebut SPM sosial. SPM sosial mencakup atas Daerah Otonom atau



disebut juga dengan Daerah yaitu SPM sosial daerah provinsi dan SPM sosial Daerah kabupaten/kota.

Untuk jenis PD pada SPM sosial Daerah provinsi dan SPM sosial Daerah kabupaten/kota terdiri atas rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, tuna sosial dan pengemis di dalam panti. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi dan kabupaten/kota

3) Meningkatkan kualitas data terpadu kesejahteraan sosial.

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial. DTKS dijadikan data acuan dalam program penanganan fakir miskin dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Ada banyak jenis bantuan DTKS antara lain :

- **Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)**

Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam upaya penanggulangan kemiskinan yaitu salah satunya melalui pemberian bantuan sosial dalam bentuk program keluarga harapan (PKH).

PKH (Program Keluarga Harapan) merupakan salah satu program unggulan dari Kementerian Sosial yang memberikan bantuan uang secara nontunai melalui KKS (ATM Himbara). Dana dari PKH disalurkan secara bertahap setiap 3 bulan sekali. Tujuan utama dari PKH ini adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin.

- **Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)**

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai atau Kartu Sembako, yang diberikan pemerintah pada masyarakat kurang mampu setiap bulan. Bantuan ini disalurkan melalui mekanisme akun elektronik, sehingga kartu sembako hanya bisa digunakan untuk membeli bahan pangan di warung yang bekerjasama dengan pihak bank.

- **Bantuan Kartu Indonesia Sehat (KIS)**

Kartu Indonesia Sehat (KIS) adalah kartu yang memiliki fungsi untuk memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis, penggunaanya sendiri dapat menggunakan fungsi KIS ini di setiap fasilitas kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjut.

BPJS Kesehatan dan KIS berbeda. Sebab, KIS khusus diperuntukkan masyarakat kurang mampu dan fakir miskin yang tidak bisa membayar iuran. Berbeda dengan BPJS Kesehatan, masyarakat wajib membayar iuran.



3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan Pemerintahan Daerah dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Grobogan. Dinas Sosial Kabupaten Grobogan sebagai organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan pelayanan bidang kesejahteraan sosial dalam bentuk penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Rumusan tujuan yang akan dicapai sesuai dalam Renstra Dinas Sosial Kabupaten Grobogan adalah :

1. Menurunkan Jumlah Masyarakat Dengan Kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas di Dinas Sosial.

Rumusan sasaran yang ingin dicapai sesuai dalam Renstra Dinas Sosial Kabupaten Grobogan adalah:

1. Meningkatnya Pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
2. Meningkatnya partisipasi kelompok-kelompok pemerhati masalah sosial dalam penanganan masalah sosial.
3. Meningkatnya kualitas pengelolaan taman makam pahlawan.
4. Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik.

Tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kabupaten Grobogan beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 3.1 sebagaimana berikut ini.



Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional/ Rumus	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun				
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Menurunkan jumlah masyarakat dengan kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		Persentase Penurunan PPKS	(jumlah PPKS rehabsos dan fakir miskin tahun n - jumlah PPKS rehabsos dan fakir miskin tahun n-1) dibagi jumlah PPKS rehabsos dan fakir miskin tahun n-1 kali 100	%/tahun	NA	NA	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
		1. Meningkatnya pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang tertangani	jumlah PPKS sasaran rehabsos dan fakir miskin yang tertangani melalui rehabsos dan bantuan perlindungan dan jaminan sosial dibagi jumlah PPKS Rehabsos dan fakir miskin kali 100	%	NA	NA	38	40	45	50	56
		2. Meningkatnya partisipasi kelompok-kelompok pemerhati masalah sosial dalam	Persentase PSKS yang diberdayakan	Jumlah PSKS Lembaga dan Non Lembaga yang diberdayakan /	%	100	100	100	100	100	100	100



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional/ Rumus	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun				
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		penanganan masalah sosial		Jumlah PSKS Lembaga dan Non Lembaga keseluruhan X 100								
		3. Meningkatnya kualitas pengelolaan taman makam pahlawan	Persentase sarana prasarana taman makam pahlawan yang sesuai dengan standar makam pahlawan	persentase sarana prasarana TMPN dan MPN memenuhi standar di seluruh TMPN dan MPN dibagi jumlah TMPN dan MPN dikali 100	%	75	75	78	80	82	84	86
2	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas di Dinas Sosial		Nilai SAKIP OPD	Hasil penilaian berdasarkan kriteria yang ada	kategori	B	B	B	B	B	B	B
			Nilai IKM OPD	Hasil penilaian berdasarkan kriteria yang ada	kategori	B	B	B	B	B	B	B
			Nilai SAKIP OPD	Hasil penilaian berdasarkan kriteria yang ada	kategori	B	B	B	B	B	B	B
		Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik	Nilai IKM OPD	Hasil penilaian berdasarkan kriteria yang ada	kategori	B	B	B	B	B	B	B



3.3. Program dan Kegiatan

Kedudukan program/kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang direncanakan merupakan implementasi program/kegiatan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Program/kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diperlukan guna mendukung pelaksanaan arah kebijakan dan program yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan tahun 2021 – 2026 untuk rencana kerja Tahun 2025

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Grobogan Tahun 2025 diantaranya:

a) Pencapaian Visi dan misi Kepala Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Grobogan 2021-2026 menetapkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Grobogan sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Grobogan yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman dan Berbudaya”

Visi tersebut diatas terdiri dari 4 frasa (bagian), yaitu Kabupaten Grobogan Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman dan Berbudaya. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial mengarah pada pencapaian unsur visi SEJAHTERA.

Misi pembangunan yang ditetapkan dalam mencapai visi yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing
2. Membangun infrastruktur daerah yang merata sesuai potensi daerah, memperhatikan kelestarian lingkungan dan risiko bencana
3. Memperkuat ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata, berkualitas dan berdaya saing
4. Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik
5. Memperkuat implementasi nilai-nilai keimanan dan budaya dalam kehidupan masyarakat

Adapun misi RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial yaitu misi ke-3 (tiga), yaitu Memperkuat ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata, berkualitas dan berdaya saing. Dengan tujuan Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah, dan sasarannya adalah meningkatnya pendapatan masyarakat. Selain itu sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah, Dinas Sosial juga mendukung pencapaian

misi ke-4 (empat), yaitu Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.

b) Pencapaian SDG's dan Pengentasan kemiskinan

Pelayanan Dinas Sosial Berdasarkan KLHS RPJMD Kabupaten Grobogan, Dinas Sosial memiliki rekomendasi dalam pelaksanaan Tujuan 1 dalam SDGs/TPB yaitu Tanpa kemiskinan dengan target Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas dan Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/programkeluarga harapan. Terkait dengan tujuan SDGs dan disandingkan dengan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Grobogan, mempertegas posisi dan peranan sektor kesejahteraan sosial dalam konstelasi pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menurunkan angka kemiskinan.

c) Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Selain faktor di atas, urusan sosial juga harus melaksanakan Standar pelayanan minimal pada Urusan Sosial. Hal tersebut berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor: 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Pelayanan Dasar Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, meliputi pelayanan dasar pada rehabilitasi sosial serta perlindungan dan jaminan sosial.

Pemenuhan SPM pada rehabilitasi sosial dengan sasaran pada penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis yang berada di luar Panti Sosial. Sementara itu, pada perlindungan dan jaminan sosial dengan sasaran terhadap korban bencana pada Saat dan setelah tanggap darurat bencana.

Urusan sosial menjadi salah satu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang harus dipenuhi dimana SPM harus menjadi prioritas dalam penganggaran program dan kegiatan. Selain itu perlunya dukungan dari tingkat pusat maupun provinsi terkait dengan penganggaran untuk SPM tersebut.

Dinas Sosial Kabupaten Grobogan dalam melaksanakan urusan wajib pemerintahan bidang sosial menurut Undang-Undang 23 tahun 2014 ada 6 sub urusan. Sub urusan tersebut adalah Pemberdayaan Sosial, Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Penanganan Bencana, dan Taman Makam Pahlawan.

Rencana Program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Grobogan Tahun

2025 dirumuskan dalam Tabel 3.2 berikut ini :



TABEL III.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosial
Kabupaten Grobogan Tahun 2025 dan Perkiraan maju Tahun 2026

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah																			
Kab. Grobogan																			
Tahun 2025																			
Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial																			
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial																			
Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					Target		
					Dinas Sosial								30.300.000.000,00					12.730.000.000,00	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								30.300.000.000,00					12.730.000.000,00	
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								30.300.000.000,00					12.730.000.000,00	
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								25.605.000.000,00					8.820.000.000,00	
1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								685.000.000,00					710.000.000,00	
1	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
						-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	6 Dokumen	-	150.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	150.000.000,00	
1	06	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														



Pemerintah Kabupaten Grobogan Dinas Sosial Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025

						-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	85.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	60.000.000,00	
1	06	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
						-	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	-	Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	26 Data	-	450.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	26 Data	500.000.000,00	
1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								3.535.000.000,00					3.825.000.000,00	
1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														



						Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % % 100 % 100 %	24 Orang/bulan	100 %	3.500.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan	3.750.000.000,00
1	06	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
						Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % % 100 % 100 %	12 Laporan	100 %	35.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	75.000.000,00
1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								320.000.000,00					335.000.000,00
1	06	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai													



Pemerintah Kabupaten Grobogan Dinas Sosial Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025

						Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu undefined	Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 100 % %	12 Unit	100 % undefined undefined	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	12 Unit	35.000.000,00	
1	06	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
						Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu undefined	Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 100 % %	4 Paket	100 % undefined undefined	130.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	150.000.000,00	
1	06	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														



						Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu undefined	Kab. Grobogan, Purwodadi, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 100 % %	16 Orang	100 % undefined undefined	85.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	16 Orang	75.000.000,00
1	06	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan													
						Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu undefined	Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 100 % %	58 Orang	100 % undefined undefined	75.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	58 Orang	75.000.000,00
1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								1.250.000.000,00					1.260.000.000,00
1	06	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													



Pemerintah Kabupaten Grobogan Dinas Sosial Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025

						Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 100 % %	12 Paket	100 %	150.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	250.000.000,00	
1	06	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
						Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 100 % %	2 Paket	100 %	75.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	150.000.000,00	
1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														



						Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Grobogan, Purwodadi, Purwodadi	100 % 100 % 100 % %	4 Paket	100 %	250.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	150.000.000,00
1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
						Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Grobogan, Purwodadi, Purwodadi	100 % 100 % 100 % %	7 Paket	100 %	85.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	45.000.000,00
1	06	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													



Pemerintah Kabupaten Grobogan Dinas Sosial Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025

						Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntasi Publik Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 100 % %	6 Dokumen	100 %	15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	15.000.000,00	
1	06	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material														
						Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntasi Publik Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 100 % %	60 Paket	100 %	125.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	60 Paket	150.000.000,00	
1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														



						Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntasi Publik Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 100 % %	12 Laporan	100 %	550.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	500.000.000,00
1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								18.635.000.000,00					1.300.000.000,00
1	06	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntasi Publik	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	% 100 % 100 % 100 %	12 Unit	100 %	135.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	150.000.000,00
1	06	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													



Pemerintah Kabupaten Grobogan Dinas Sosial Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025

						Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	% 100 % 100 % 100 %	2 Unit	100 %	18.500.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	1.150.000.000,00	
1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								760.000.000,00					840.000.000,00	
1	06	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
						Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 % % 100 %	10000 Laporan	100 %	8.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10000 Laporan	15.000.000,00	
1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														



						Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 % % 100 %	4 Laporan	100 %	125.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	250.000.000,00
1	06	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
						Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 % % 100 %	12 Laporan	100 %	77.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	75.000.000,00
1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													



Pemerintah Kabupaten Grobogan Dinas Sosial Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025

						Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 % % 100 %	12 Laporan	100 %	550.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	500.000.000,00	
1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								420.000.000,00					550.000.000,00	
1	06	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
						-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	15 Unit	-	250.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit	250.000.000,00	
1	06	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
						-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	4 Unit	-	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	150.000.000,00	
1	06	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														



						-	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	2 Unit	-	70.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	150.000.000,00
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL								675.000.000,00					785.000.000,00
1	06	02	2.02		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota								50.000.000,00					60.000.000,00
1	06	02	2.02	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang													
						Persentase peningkatan kapasitas PSKS Lembaga Persentase peningkatan kapasitas PSKS Non Lembaga	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Persentase peningkatan kapasitas PSKS Lembaga dan Non Lembaga	Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	12 Dokumen	100 %	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	12 Dokumen	60.000.000,00
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota								625.000.000,00					725.000.000,00
1	06	02	2.03	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota													



Pemerintah Kabupaten Grobogan Dinas Sosial Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025

						Persentase peningkatan kapasitas PSKS Lembaga Persentase peningkatan kapasitas PSKS Non Lembaga	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pemohon ijin undian berhadiah yang ditangani	Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	575786 Orang	100 %	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	575786 Orang	150.000.000,00	
1	06	02	2.03	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota														
						Persentase peningkatan kapasitas PSKS Lembaga Persentase peningkatan kapasitas PSKS Non Lembaga	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pemohon ijin undian berhadiah yang ditangani	Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	300000 Orang	100 %	250.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	300000 Orang	250.000.000,00	
1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota														



						Persentase peningkatan kapasitas PSKS Lembaga Persentase peningkatan kapasitas PSKS Non Lembaga	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pemohon ijin undian berhadiah yang ditangani	Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	10 Lembaga	100 %	75.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Lembaga	75.000.000,00
1	06	02	2.03	0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)													
						Persentase peningkatan kapasitas PSKS Lembaga Persentase peningkatan kapasitas PSKS Non Lembaga	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pemohon ijin undian berhadiah yang ditangani	Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	30 Sertifikat	100 %	200.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Sertifikat	250.000.000,00
1	06	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN								10.000.000,00					25.000.000,00
1	06	03	2.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal								10.000.000,00					25.000.000,00
1	06	03	2.01	0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal													



Pemerintah Kabupaten Grobogan Dinas Sosial Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025

						Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang ditangani	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase warga negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dtangani undefined	Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	10 Orang	100 % undefined undefined	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	25.000.000,00	
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL								1.960.000.000,00					1.500.000.000,00	
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial								1.785.000.000,00					1.250.000.000,00	
1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan														



						Persentase PPKS di Luar Panti yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti yang terlayani	Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57 %	2200 Orang	100 %	215.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	2200 Orang	250.000.000,00
1	06	04	2.01	0002	Penyediaan Sandang													
						Persentase PPKS di Luar Panti yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti yang terlayani	Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57 %	500 Orang	100 %	150.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	250.000.000,00
1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu													



Pemerintah Kabupaten Grobogan Dinas Sosial Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025

						Persentase PPKS di Luar Panti yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti yang terlayani	Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57 %	50 Orang	100 %	250.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	250.000.000,00	
1	06	04	2.01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat														
						Persentase PPKS di Luar Panti yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti yang terlayani	Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57 %	320 Orang	100 %	1.170.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	320 Orang	500.000.000,00	
1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial								175.000.000,00					250.000.000,00	
1	06	04	2.02	0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota														



Pemerintah Kabupaten Grobogan Dinas Sosial Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025

						Persentase PPKS di Luar Panti yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Persentase PPKS Lainnya Bukan Korban HIV / AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57 %	100 Dokumen	14,99 %	175.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	100 Dokumen	250.000.000,00
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL								1.250.000.000,00					750.000.000,00
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota								1.250.000.000,00					750.000.000,00
1	06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota													
						Persentase Fakir miskin yang diberdayakan Persentase PPKS yang menerima Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Persentase Fakir miskin yang diberdayakan Persentase PPKS yang menerima Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16,55 % 42,77 %	240 Orang	16,55 % 42,77 %	1.000.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	240 Orang	500.000.000,00
1	06	05	2.02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota													
						Persentase Fakir miskin yang diberdayakan Persentase PPKS yang menerima Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Persentase Fakir miskin yang diberdayakan Persentase PPKS yang menerima Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16,55 % 42,77 %	30000 Keluarga	16,55 % 42,77 %	250.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	30000 Keluarga	250.000.000,00
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA								450.000.000,00					500.000.000,00



Pemerintah Kabupaten Grobogan Dinas Sosial Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025

1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota								200.000.000,00					250.000.000,00
1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan													
						-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	-	Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	300 Orang	-	200.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	250.000.000,00
1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota								250.000.000,00					250.000.000,00
1	06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana													
						Persentase PPKS Korban Bencana yang Tertangani	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase SDM Taruna Siaga Bencana terlibat aktif dalam penanganan kebencanaan	Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	80 Orang	100 %	250.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Orang	250.000.000,00
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN								350.000.000,00					350.000.000,00
1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota								350.000.000,00					350.000.000,00
1	06	07	2.01	0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota													



						-	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	-	Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	4 Dokumen	-	350.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	4 Dokumen	350.000.000,00
TOTAL													30.300.000.000,00					12.730.000.000,00



BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026 dengan tetap memperhatikan Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Grobogan pada Tahun 2025 tetap merujuk pada target RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2025 , Pagu Indikatif, lokasi kegiatan, serta SDM dan sarana penunjang lainnya yang dapat menentukan keberhasilan suatu program dan kegiatan.

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi Program dan Kegiatan Guna menunjang ketercapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Grobogan Tahun 2024 ini, maka disusun beberapa Program dan Kegiatan terkait penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Grobogan oleh Dinas Sosial Kabupaten Grobogan. Ada 6 Program, 13 kegiatan dan 28 Sub Kegiatan pada Dinas Sosial Kabupaten Grobogan Tengah Tahun 2024 dengan Rencana Anggaran sebesar Rp. 6.304.419.000- yang digunakan untuk Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Non-Urusan dan Urusan Wajib sebagaimana tabel 4.1. dibawah ini :

TABEL 3.1
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Kode	Rencana Kerja Program	Jumlah Dana	Keterangan
1.06.01	Pogram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.768.238.000-	
1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	110.930.00,-	
1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	1.006.530.000,-	
1.06.05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	173.825.000,-	
1.06.06	Program Penanganan Bencana	163.924.000,,,-	
1.06.07	Program Pengelolaan Taman Pahlawan	30.000.000,-	
	Jumlah	6.308.419.000,-	



BAB 5 PENUTUP

Renja (Rencana Kerja) Dinas Sosial Kabupaten Grobogan merupakan rencana kerja tahunan yang disusun berdasarkan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Grobogan, guna menunjang tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Grobogan serta sasaran dan target pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Grobogan.

Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Grobogan berfungsi sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Grobogan Tahun 2024, maka penetapan prioritas pembangunan diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergi serta berkelanjutan, dengan sesama perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Grobogan maupun dengan perangkat daerah yang membidangi fungsi lain yang berkaitan.

Grobogan, 8 Maret 2024
KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN GROBOGAN

NOR AGIS VELAWATI, SE.MM
NIP. 198508172009022012